

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam konteks politik Indonesia, kiai memiliki peran yang unik dan signifikan, terutama dalam komunitas pesantren.<sup>1</sup> Sebagai pemimpin spiritual dan intelektual, kiai tidak hanya menjadi panutan dalam bidang keagamaan tetapi juga tokoh berpengaruh dalam ranah sosial dan politik. Peran mereka bahkan meluas hingga ke arena pilihan partai politik, di mana keputusan mereka sering kali memengaruhi preferensi politik para santri, keluarga besar pesantren, dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini terutama terlihat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dikenal sebagai “Kota Santri” karena banyaknya pesantren besar dan berpengaruh yang ada di sana.

Pondok pesantren di Jombang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat gerakan sosial dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa kiai dari pesantren-pesantren di Jombang, seperti Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Tebuireng, dan Darul Ulum Rejoso Peterongan, memiliki kontribusi besar dalam pembentukan organisasi sosial seperti Nahdlatul Ulama (NU) serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, pengaruh politik kiai juga terus berlanjut di era modern melalui partisipasi aktif mereka dalam politik

---

<sup>1</sup> Rahman, M. F., *Distingsi Pemilih Di Indonesia: Studi Fenomenologis Habitus Dan Perilaku Pemilih* (Jakarta: UI Press, n.d.), 123.” Dalam politik Indonesia, kiai memainkan peran yang penting, terutama dalam komunitas pesantren. Mereka bukan hanya tokoh agama yang dihormati, namun juga memiliki pengaruh besar dalam dinamika sosial dan politik. Kiai sering kali dianggap sebagai pemimpin moral yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks pemilu, kiai sering menjadi panutan bagi santri dan masyarakat sekitar dalam menentukan pilihan politik. Dukungan seorang kiai terhadap calon tertentu dapat berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara, terutama di daerah yang mempunyai tradisi. Selain itu, peran kiai dalam politik juga dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan nasional. Beberapa kiai bahkan terlibat langsung dalam pemerintahan, baik sebagai anggota legislatif, penasihat politik, maupun pejabat negara. Dengan demikian, kiai tidak hanya berperan dalam pendidikan dan dakwah, tetapi juga dalam membentuk arah politik

praktis, termasuk pencalonan dalam pemilihan umum.

Dalam kerangka teori sosial, tindakan politik kiai dapat dianalisis melalui konsep rasionalitas tindakan yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat jenis: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional nilai, dan tindakan rasional instrumental. Keempat jenis tindakan ini relevan untuk memahami bagaimana kiai di Jombang menentukan pilihan politik mereka. Misalnya, pilihan kiai untuk mendukung partai politik tertentu sering kali didasarkan pada nilai-nilai agama (rasionalitas nilai), relasi personal dengan tokoh politik (afektif), atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penguatan pengaruh pesantren (rasional instrumental). Dalam konteks lokal, teori Weber ini dapat dipadukan dengan konsep budaya politik Gabriel Almond, yang mengidentifikasi budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.<sup>2</sup> Di Jombang, kombinasi budaya politik ini terlihat dalam bagaimana kiai memobilisasi santri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

---

<sup>2</sup> Weber, M, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), 326." Dalam konteks lokal, teori Max Weber tentang otoritas dan legitimasi dapat dikombinasikan dengan konsep budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Almond membagi budaya politik menjadi tiga kategori utama, yaitu parokial, kaula, dan partisipan

. Jenis budaya politik yang ketiga ini menggambarkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik di lingkungannya. Budaya politik parokial terjadi ketika masyarakat memiliki kesadaran politik yang rendah dan tidak banyak terlibat dalam sistem politik. Mereka cenderung pasif serta lebih fokus pada kehidupan sehari-hari tanpa banyak perhatian terhadap pemerintah atau kebijakan publik. Budaya politik kaula mencerminkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan keberadaan sistem politik, namun keterlibatan mereka masih terbatas. Mereka memahami adanya pemerintah dan aturan yang mengatur kehidupan mereka, namun lebih bertekad sebagai penerima kebijakan tanpa banyak partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipan budaya politik terjadi ketika masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, dan bahkan terlibat dalam organisasi politik atau pemerintahan. Ketika teori Weber tentang otoritas dan kepemimpinan dipadukan dengan konsep budaya politik Almond, dapat terlihat bagaimana pola kepemimpinan di tingkat lokal dipengaruhi oleh budaya politik masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat dengan budaya politik parokial, pemimpin cenderung memiliki otoritas tradisional, seperti kepala suku atau tokoh adat. Sementara itu, dalam budaya politik partisipan, kepemimpinan sering didasarkan pada rasionalitas dan legitimasi demokratis. Dengan demikian, kombinasi kedua teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika politik lokal di Indonesia dan bagaimana berinteraksi masyarakat dengan pemimpinnya.

Pilihan politik kiai di Jombang juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan modal yang mereka miliki. Teori Pierre Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena menjadi relevan untuk menganalisis fenomena ini. Modal sosial, kultural, dan simbolik yang dimiliki kiai memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam politik lokal maupun nasional. Misalnya, seorang kiai dengan modal sosial yang tinggi dihormati oleh masyarakat luas dan memiliki jaringan yang kuat cenderung memiliki pengaruh besar dalam menentukan pilihan politik pesantren dan komunitasnya. Modal ini tidak hanya digunakan untuk memperkuat posisi pesantren tetapi juga untuk membangun jaringan politik yang lebih luas dengan aktor-aktor politik lainnya.

Fenomena keterlibatan kiai dalam politik memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa kolonial, pesantren berfungsi sebagai pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pada tahun 1945 adalah salah satu contoh bagaimana pesantren menjadi aktor penting dalam dinamika politik nasional. Setelah kemerdekaan, peran ini berlanjut dengan keterlibatan kiai dalam politik praktis melalui partai-partai berbasis agama, seperti Partai NU (yang kemudian menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam konteks ini, kiai tidak hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi juga menjadi aktor politik yang memengaruhi arah kebijakan publik.

Namun, keterlibatan kiai dalam politik tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga netralitas dan integritas mereka sebagai pemimpin agama di tengah persaingan politik yang sering kali sarat dengan konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan kiai dalam mendukung partai politik tertentu dapat memicu polarisasi di kalangan santri dan masyarakat pesantren. Hal ini terutama terjadi ketika keputusan politik kiai tidak sejalan dengan aspirasi sebagian komunitas pesantren atau ketika dukungan politik mereka dianggap terlalu pragmatis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rahman, M. F., *Distingsi Pemilih Di Indonesia: Studi Fenomenologis Habitus Dan Perilaku Pemilih*, 35." Dalam konteks politik Indonesia, kiai memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam komunitas pesantren. Namun, keputusan politik mereka tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Ketika seorang kiai mengambil keputusan politik yang tidak sejalan dengan aspirasi sebagian komunitas pesantren, hal ini dapat menimbulkan polemik dan bahkan perpecahan di

Di sisi lain, keterlibatan kiai dalam politik juga memberikan peluang untuk memengaruhi kebijakan publik yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan. Sebagai contoh, partai-partai politik yang ada legislatifnya dari pesantren sering kali memiliki keunggulan elektoral yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim yang besar seperti Jawa Timur. Oleh karena itu, memahami tindakan politik kiai tidak hanya penting untuk memahami dinamika politik lokal tetapi juga untuk menganalisis bagaimana agama memengaruhi politik di tingkat nasional.

Penelitian tentang tindakan politik kiai di Jombang menjadi semakin relevan dalam konteks pemilu 2024, di mana persaingan politik semakin ketat dan peran kiai sebagai penggerak sosial-politik semakin strategis. Pilihan politik kiai tidak hanya mencerminkan preferensi individu tetapi juga dinamika sosial, budaya, dan politik di komunitas pesantren. Sebagai pemimpin yang memiliki otoritas moral, kiai sering kali dianggap sebagai penjaga nilai-nilai agama di tengah perubahan sosial yang cepat. Namun, peran ini juga menempatkan mereka dalam posisi yang dilematis ketika menyeimbangkan antara tanggung jawab moral dan pragmatisme politik.

Studi tentang politik memang seksi ketika dilihat dari sudut pandang manapun, sehingga tidak sedikit dilakukan oleh intelektual di luar negeri maupun di dalam negeri, akan tetapi masih minim yang melakukan kajian

---

kalangan santri maupun masyarakat sekitar. Beberapa santri dan pengikut mungkin merasa kecewa jika keputusan politik kiai dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai ideal yang mereka yakini. Selain itu, dukungan politik yang terlalu pragmatis juga dapat menjadi sumber kontroversi. Dalam beberapa kasus, kiai mendukung kandidat atau partai politik berdasarkan pertimbangan strategis, seperti keuntungan jangka pendek atau akses terhadap kekuasaan, daripada pertimbangan ideologis atau kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini bisa menimbulkan dampak bahwa kiai lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan pesantren dan masyarakat. Akibatnya, muncul di kalangan santri dan alumni pesantren mengenai independensi dan integritas politik kiai. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran kiai dalam politik tidak selalu diterima secara mutlak. Meskipun mereka memiliki pengaruh yang besar, keputusan politik mereka tetap dapat diperdebatkan, terutama jika dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa dalam komunitas pesantren pun terdapat dinamika politik yang kompleks dan tidak selalu seragam.

tindakan pilihan partai politik para kiai di pondok pesantren yang ada di Jombang.

Kandung maksud dari tulisan ini adalah melihat paradigma fakta sosial dari tindakan pilihan partai politik kiai pesantren yang ada di kabupaten Jombang. Dengan melihat realitas sosial menggunakan pemikirannya Max Weber yaitu rasionalitas tindakannya guna mengkaji motif dan perilaku manusia, sekaligus dijumpai oleh Gabriel A. Almond dengan budaya politik parokia, budaya politik kaula serta budaya politik partisipan, terkait pilihan politik kiai di Jombang. Sebagaimana Gabriel A. Almond<sup>4</sup> melontarkan pemikiran tentang budaya politik terhadap sikap seseorang mengenai sebuah sistem politik sekaligus perangkatnya, begitu juga sikap seseorang terhadap peranan yang bisa dimainkan melalui sebuah sistem politik. Dinamika budaya politik kiai di pesantren yang ada di Jombang, memiliki orientasi psikologis terhadap objek sosial. Sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam keluarga pesantren sebagai bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, bahkan evaluative dengan cara menjabarkan sistem nilai-nilai terkait dinamika budaya politik kiai yang ada di pesantren yang secara terus menerus berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman<sup>5</sup>, bersamaan dengan itu bisa saja mempengaruhi terhadap pilihan politik para kiai. Bahkan perilaku mereka sebagai polarisasi politik didalam pesantren sebagai titik tolak dalam penelitian ini sebagaimana Pierre Bourdieu memiliki pemikiran tentang Habitus, Modal dan Arena, dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pilihan politik kiai di Jombang, dari sudut pandang Bourdieu, kita melihat bagaimana disposisi internal dan struktur sosial membentuk tindakan politik. peneliti memahami

---

<sup>4</sup> Gabriel A Almond, S.V, *Budaya Politik Tingkahlaku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 113.

<sup>5</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Pandangan Hidup Kedepan Indonesia* (Jakarta: LPES, 2019), 07; Moh Asror Yusuf, *Kontruksi Epistimologi Toleransi Dipesantren* (Bandung: CV Cendekian Press, 2018), 45; Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 166; Ali Maschan Moesa, *Kiai Dan Politik Dalam Wacana Civil Society* (Surabaya: LEPKISS, 1999), 138; Ahmad Subakir., *Relasi Kiai Dan Kekuasaan Menguak Relasi Kiai Dan Pemerintah Dalam Politik Lokal* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2013), 126; Ahmad Patoni, *Kiai Pesantren Dan Dialektika Politik Kekuasaan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 102AD), 102; Nucholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 221; Van Martin Bruinessen, *Kitab Kuning* (Bandung: Mizan, 1995), 123; Hiriko Horikhosi, *Kiai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 118; Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia* (Inggris: Oxfod University, 1990), 92.

bagaimana modal sosial dan pertimbangan rasional mempengaruhi keputusan politik. Dengan demikian pilihan politik kiai di Jombang bisa mencakup : Bagaimana habitus dan modal kiai membentuk preferensi politik mereka. Serta bagaimana mereka menggunakan modal sosial untuk membangun jaringan dan memobilisasi dukungan politik. Sebagaimana masih minim yang membahas politik lokal guna menampilkan isu-isu anomaly cukup fantastis.<sup>6</sup>

Kecenderungan dalam paradigmatik akan dikaji dengan cara mendengarkan suara kiai yang aktif dalam berpolitik praktis dibingkai *sosio politik kultural* yang ada di empat pondok pondok pesantren berpengaruh di Jombang antarlain : pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Tebuireng Jombang serta Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang.

Pada zaman orde baru, elite politik local banyak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ormas dan OKP (organisasi kepemudaan) yang bersefahaman dengan rezim, akan tetapi pada sekarang ini sudah tidak sedikit dimainkan oleh kalangan elite pesantren sendiri, terutama kiai juga santri. Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam dimana persoalan ini cukup aktual sebagai sumbangsih pemikiran dalam paradigma temuan-temuan teoritik yang memadukan *Studi Islam* dengan *Ilmu-Ilmu Social*.

Fakta social dimasyarakat bahwa salah dalam memilih partai politik bagi kiai yang menjadi kontestan pada pemilu bisa berdampak pada perolehan suara dalam legeslatif, dimana kiai juga sebagai pengasuh pesantren rata-rata cenderung memilih partai politik yang mendukung nilai-nilai agama dan isu-isu yang dianggap penting dalam konteks keagamaan. Sehingga partai politik yang berkomitmen terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan umat

---

<sup>6</sup> Loede Ida, *Anatomi Konflik, NU, Elit Politik Dan Negara, Sinar Harapan* (Jakarta: Sinar . harapan, 2022), 126. Taufik Alamin, *Budaya Politik Masyarakat Matraman Di Kota Kediri* IAIN Kediri pres, 2022. 122.

mungkin lebih menarik bagi pengasuh pesantren, sebagaimana sikap terhadap kebijakan sosial seperti kesehatan, kemiskinan, dan keadilan sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi kiai.

Salah dalam memilih dapil<sup>7</sup> (daerah pemilihan) bagi kiai yang mau ikut kontestan pemilihan umum, berdampak pada dimulainya lagi membangun jejaring, tim sukses dalam dukungan pilihan, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya representasi yang efektif. tidak sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap pemilihan di daerah pemilihan yang tidak dikenal atau dipahami dengan baik dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap masalah-masalah lokal yang mungkin berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini dapat menghambat kemampuan caleg untuk menanggapi kebutuhan khusus masyarakat di daerah tersebut. Tidak optimalnya pemanfaatan suara pemilih di daerah pemilihan yang tidak strategis dapat mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan suara. Dalam beberapa sistem pemilihan, terdapat aturan distribusi kursi yang dapat membuat perbedaan suara di daerah pemilihan tertentu lebih signifikan dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami betapa urgennya memilih di daerah pemilihan yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari dan kepentingan pribadi atau komunitas. Pemilihan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa suara setiap individu diperhitungkan dengan baik dalam representasi pilihan partai politik kiai.<sup>8</sup> Kerukunan dan keragaman agama di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam membangun stabilitas sosial dan politik.

Pentingnya partisipasi kiai pengasuh pesantren sebagai calon legislative dalam dunia politik sebagai wakil umat, seringkali dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin spiritual dan intelektual. Dengan menjadi caleg, mereka dapat menjadi wakil umat Islam atau kelompok agama tertentu di parlemen, memberikan suara dan pemikiran yang mewakili pandangan dalam kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Advokasi nilai-nilai keagamaan seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai

---

<sup>7</sup> David Easton, *The Analysis of Political Structure* (New York: Routledge, 1990), 223.

<sup>8</sup> Zayad Abd. Rahman., 'Konsep Ummah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa)' 6, no. 2 (April 2015): 125. Moh Muwafiqillah. "Pergeseran Idiologi Politik Islam di Indonesia" *Jurnal Alhikmah* Vol.10 No.2, 78-91. Wahidul Anam, "Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri" (Kediri: IAIN Kediri Press), 36.

keagamaan dan moral.<sup>9</sup> Dengan menjadi bagian dari lembaga legislatif, mereka dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan masyarakat. Dengan menjadi caleg, pengasuh pesantren dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka dapat menggunakan pengalaman mereka untuk merancang kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat yang mereka layani. Keterlibatan pengasuh pesantren dalam politik dapat membantu menjembatani kesenjangan antara dimensi keagamaan dan politik. Ini dapat memfasilitasi dialog dengan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga keagamaan dengan lembaga pemerintahan, sebagaimana para politisi yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Mamba'ul Ma'arif Denanyar serta Pondok Pesantren Tebuireng dan Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang.

Pengasuh pesantren atau kiai terjun dalam dunia politik sudah seharusnya, Dalam konteks politik di Indonesia, kiai memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi muslim yang besar seperti Jawa Timur.

---

<sup>9</sup> Romlah, Sitti, dan Rusdi., 'Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika.', " *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 1 (2023): 67." Advokasi nilai- nilai keagamaan adalah proses mempromosikan, mendukung, dan menginternalisasi ajaran agama serta nilai moral ke dalam kehidupan individu dan masyarakat. Advokasi ini biasanya dilakukan oleh tokoh agama, pendidik, atau lembaga yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan moralitas. Peran utama advokasi ini adalah membimbing masyarakat untuk mengamalkan prinsip-prinsip keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Pendidikan agama menjadi elemen penting dalam advokasi ini. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan solidaritas dapat ditanamkan sejak dini. Selain itu, advokasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa yang bermoral dan beradab. Dalam konteks sosial, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan sosial, mencegah konflik, dan menciptakan harmoni di masyarakat yang majemuk. Namun, advokasi ini juga menghadapi tantangan, seperti resistensi budaya, pluralitas keyakinan, dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, strategi advokasi inklusif dan adaptif, dengan tetap menghormati keberagaman. Dengan pendekatan yang tepat, advokasi nilai-nilai keagamaan dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera."

<sup>10</sup> M. Masruri, Sobari, Tawwakal., 'Kiai Dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori Dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Di Kecamatan Tegalrejo.', *Jurnal PolGov* 2, no. 2 (2020): 233." Pengasuh pesantren atau kiai memiliki peran signifikan dalam dunia politik Indonesia. Keterlibatan mereka dianggap wajar mengingat pengaruh besar yang mereka miliki terhadap pilihan politik masyarakat, terutama di wilayah dengan populasi Muslim yang dominan seperti Jawa Timur. Kiai sering menjadi patron politik bagi masyarakat, di mana pandangan dan arahan mereka dijadikan acuan dalam menentukan preferensi politik. Hal ini terlihat dalam berbagai momentum politik, baik pada tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah

Di wilayah ini, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan Mamba'ul Ma'arif Denanyar serta Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang menjadi representasi dari pusat keilmuan dan spiritual yang berpengaruh, serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam pilihan politik lokal dan nasional, sehingga peneliti menyebutnya sebagai empat pilar kota santri sebagai khazanah pesantren berpengaruh di Jombang, sebagaimana banyaknya para pengasuh juga ikut memperjuangkan kemerdekaan sebagaimana di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang juga ada KH Wahab Hasbulloh yang menjadi pahlawan nasional RI, Salah satu pendiri Nahdlotul Ulama' sekaligus pengarang lagu "ya ahlal waton". Begitu juga KH Bisri Syansuri dari Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Juga pernah menjadi DPR RI dari partai persatuan pembangunan (PPP), sekaligus juga pendiri Nahdlotul Ulama'. Dan beliau berdua adalah masih ada hubungan famili.

Sedangkan pondok pesantren Tebuireng juga masih ada sambung persaudaraan dengan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, dikarenakan KH Hasyim As'yari beliau besanan dengan KH Bisri Syansuri sehingga punya cucu yang terkenal, dan pernah menjadi presiden republik Indonesia beliau adalah KH Abdurrahman Wahid.

Sedangkan pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang juga masih ada sambung persaudaraan dengan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Dimana putrinya KH Shohib Bisri menikah dengan putranya KH Romli Tamim Petrongan Jombang, begitu pula dari KH Wahab Hasbulloh juga putrinya dinikahkan dengan putranya KH Romli Tamim yang bernama KH Mustai Romli sehingga jika dihubungkan masih memiliki garis persaudaraan di antara empat pilar pondok pesantren berpengaruh di kota santri tersebut.

Dari pondok Mamba'ul Ma'arif dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum tersebut yang sama-sama masih ada ikatan geneologi dari KH Hasbulloh Said, memiliki generasi penerus pengasuh di pondok pesantren banyak yang aktif serta

---

menghadapi tantangan, termasuk potensi fragmentasi politik dan perubahan relasi antara kiai dan masyarakat santri. Oleh karena itu, peran kiai dalam politik Indonesia memerlukan keseimbangan antara fungsi keagamaan dan keterlibatan politik untuk menjaga integritas sosial dan moral masyarakat."

ikut berkiprah dalam kontestan pencalegan partai politik dari berbagai macam partai di Indonesia. Ada yang di PPP, PKB, Golkar, dan NASDEM.<sup>11</sup> Bahkan pada periode sekarang Ketua DPW PKB Jawa Timur di pegang oleh DR.H Halim Iskandar. M.Pd. Kakaknya DR. Abd Muhaimin Iskandar. MSi, Ketua DPP PKB, yang notabeneanya adalah cicit dari keturunannya KH Bisri Syansuri dari pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Sedangkan dari partai persatuan pembangunan (PPP) Jawa Timur DPW di komandani atau yang menjadi ketua adalah Ibu Nyai Hj Munjidah wahab (mantan bupati Jombang), yang notabeneanya putrinya KH Wahab Hasbullah dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Bahkan ada Juga ketua DPD Nasdem kabupaten Jombang juga masih keturunannya KH Bisri Syansuri, Bernama Dra. Hj Muklina Sohib beliau adalah cucunya KH Bisri Syansuri dari pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Sedangkan ketua cabang Jombang partai persatuan pembangunan (PPP) adalah H Achmad Silahuddin S.Ip sekaligus ketua fraksi PPP DPRD Jatim (2019-2024), beliau adalah cucunya KH Wahab Hasbulloh dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Sedangkan dari pondok pesantren Tebuireng Jombang banyak sekali memiliki tokoh nasional mulai dari KH Hasyim Asy'ari, putera beliau KH Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur (Abdurahman Wahid), serta KH Yusuf Hasyim putranya KH Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan panggilan Pak Ud pernah tercatat ikut sebagai anggota parlemen DPRGR hingga DPR RI di tahun 1967-1977.<sup>12</sup> Salah satu kader partai NU hingga dirinya pernah mendirikan sebuah partai yang dinamai PKU meski tak berhasil memenangkan pemilu di tahun 1999. Serta kiprah politiknya diteruskan putranya KH Mochamad Irfan Yusuf, dari partai Gerindra yang menjadi DPR RI Dapil 8 Jatim DPR RI periode 2024.

Sedangkan dari pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang yang terkenal adalah KH Mustain Romli sekaligus politisi ini juga cukup dekat dengan pemerintah orde baru dan Golkar. Pada acara peresmian Universitas Darul Ulum para pejabat negara hadir, antara lain Jenderal A.H. Nasution dari Jakarta. Fakultas pertama yang dibuka adalah Fakultas Hukum, lalu disusul Fakultas sosial dan ilmu politik, serta Fakultas Pertanian.

<sup>11</sup> Tebuireng Online, 'Profil Singkat Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar,' n.d., 3.

<sup>12</sup> "KH Bisri Syansuri, 'Nasab Dan Sanad Keilmuan,'" 2024, 2.

Pada tahun 1969. Serta masih banyak tokoh yang lainnya, sedangkan yang peneliti lakukan disini adalah khusus tahun 2024 pemilu sekarang ini yang menjadi politisi di pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang adalah Kiai Sentot dari partai Demokrat panggilannya, nama asli beliau adalah KH Moh Syarif Hidayatullah, ST., M.MT.yang jadi ketua Partai Demokrat sekaligus jadi Ketua Komisi B. DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024.

Walaupun dari para kiai tersebut memiliki berbagai ragam pilihan partai politik, di dalam pluralitas partai politik, akan tetapi ketika ada haulnya KH Bisri Syansuri di pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif serta di Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Haulnya KH Wahab Hasbulloh, begitu juga haulnya Gus Dur Tebuireng, haulnya KH Romli Tamim di Dahrul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Beliau semua duduk bareng dengan canda dalam pidatonya dengan guyonan serta candaan khas ala dipesantren seakan-akan tidak ada masalah walaupun mereka berangkat dari baju partai yang berbeda-beda.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori rasionalitas tindakan social dari Max Weber,<sup>13</sup> tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional nilai dan tindakan rasionalitas instrumental. Dalam beberapa pemilihan umum terkini, terlihat bahwa partai politik yang mendapatkan dukungan dari kiai dan pondok pesantren sering kali memiliki keunggulan tertentu dalam merebut suara dari basis pemilih muslim.

Penelitian tentang tindakan kiai dalam pilihan partai politik studi terhadap tindakan kiai pondok pesantren di Jombang menjadi penting untuk dipahami lebih dalam. Dengan memahami keragaman dalam dinamika tindakan kiai dalam pilihan partai politik di pesantren Jombang.

---

<sup>13</sup> Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Francis: Taylor and Francis Group, 1930), 232." Max Weber's theory of social action rationality categorizes human actions based on the subjective meanings individuals attach to them. In his work *Economy and Society*, Weber identifies four types of rationality that guide social actions. The first, instrumental rationality (*Zweckrationalität*), involves actions that are goal-oriented, where individuals choose the most efficient means to achieve a desired end, such as a businessperson strategizing to maximize profits. The second, value-rationality (*Wertrationalität*), is driven by adherence to intrinsic values or ethical principles, regardless of the outcomes; for instance, fasting for religious reasons reflects value-rationality. Third, affectual action is motivated by emotions or feelings rather than calculated decisions, such as crying at a funeral or cheering during a sports event. Lastly, traditional action is guided by established customs or habits, performed because "it has always been done this way," like following cultural rituals. Weber's framework highlights the importance of subjective meaning in understanding social actions, distinguishing them from mere behaviors. This perspective forms the basis of interpretive sociology (*Verstehen*), which seeks to understand the motivations and meanings that underpin human behavior.

kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dinamika politik di Indonesia, terutama dalam konteks politik para kiai yang dipesantren. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran kiai dan pondok pesantren dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat, serta implikasi politiknya dalam tingkat lokal dan nasional, sebagai pisau analisis tindakan guna mengungkap secara mendalam dari sisi pilihan politik pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan serta pondok pesantren Tebuireng Jombang. Sehingga menjadi betapa pentingnya penelitian ini dilakukan.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana tindakan kiai dalam pilihan partai politik di Pesantren Jombang?
2. Bagaimana keragaman dan dinamika tindakan kiai dalam pilihan partai politik di pesantren Jombang?

### **C. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindakan kiai dalam pilihan partai politik di Pesantren Jombang.
2. Untuk menganalisis keragaman dan dinamika tindakan kiai dalam pilihan partai politik di pesantren Jombang

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini memiliki empat kegunaan utama. *Pertama*, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian politik terapan, khususnya dalam menganalisis pilihan partai politik kiai pondok pesantren, dengan mengacu pada hasil penelitian lapangan dan pengembangan teori dalam konteks politik lokal. *Kedua*, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap rasionalitas tindakan pilihan partai politik oleh kiai pengasuh pesantren, berdasarkan teori rasionalitas politik seperti yang telah dikembangkan oleh Max Weber, sekaligus menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi politisi dalam pengambilan keputusan.

*Ketiga*, penelitian ini mengonstruksikan rasionalitas tindakan pilihan partai politik kiai pengasuh pesantren tidak hanya sebagai prinsip teologis atau wacana kritis, tetapi juga sebagai agen sosial dan strategi politik yang mendukung dakwah Islam. *Keempat*, penelitian ini menyuguhkan fenomena sosial berupa strategi dan budaya politik kiai pengasuh pesantren di Jombang, yang berpijak pada temuan empiris serta mengombinasikan teori politik dengan implementasi nyata dalam konteks lokal.

## 2. Praktis.

*Pertama*; otomatis sebagai pedoman bagi para praktisi dan politisi. *Kedua* ; Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti setelahnya sekaligus pemerhati politik guna melakukan penelitian setelahnya. *Ketiga* : Sebagai bahan kajian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik lokal. *Keempat*; Sebagai bahan refleksi bagi para kiai pengasuh pesantren yang tertarik pada dunia politik, sudah sejauh manakah capaian mereka selama ini, serta peluang-peluang lain yang butuh sentuhan baru guna pengembangan yang lebih progresif.

## E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu guna membedakan dengan penelitian penulis.

No	Penulis, judul, dan Jenis penelitian	Temuan penelitian	Metode	Perbedaan dengan penelitian saya
1	Hajanto, N. 2011 politik kekerabatan dan institusional partai politik di Indonesia. analisis CSIS Vol. 40, No.2, 2011: 138-159	Mengkaji praktik politik kekerabatan dan institusionalisasi partai politik di Indonesia, di mana seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik tidak diimbangi dengan pelembagaan partai, menyebabkan maraknya politik kekerabatan.	Menguji hipotesis dengan pendekatan sosiologis serta nepotisme dan menjelaskan batas-batas serta sikap.	Fokus penelitian ini pada politik lokal di Kab Jombang yang masih memiliki geneologi pada Pengasuh Pesantren
2	Ahmad subakir, 2018 Relasi kiai dan kekuasaan: menguak relasi kiai dan pemerintahan daerah dalam	Pola hubungan dan relasi symbiosis mutualistik antara kiai dan pejabat pemerintah, yang dibangun melalui komunikasi dan	Penelitian kualitatif deskriptif dengan latar belakang alami dan analisis	Fokus penelitian ini pada relasi antar Kiai pengasuh pesantren di Jombang yang

	politik lokal. universitas merdeka malang	kegiatan bersama untuk saling menyodorkan gagasan masing-masing.	induktif data.	masih memiliki ikatan persaudaraan dalam politik lokal.
3	M. fajrul rahman, 2021 distingsi pemilih di Indonesia (Studi Interpretative Phenomenological analysis habitus kelas dan perilaku pemilih dengan pendekatan strukturalisme genetik pierre bourdieu). UI	Penelitian ini mengkaji perilaku memilih berdasarkan distingsi kelas sosial dan habitus, yang mempengaruhi produksi opini politik dan preferensi pemilih di Indonesia, dengan tujuan mendemokratisasikan demokrasi sesuai agenda reformasi.	Metode convergent parallel mixed method dengan pendekatan kuantitatif analisis kluster dan kualitatif melalui wawancara mendalam.	Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap fenomena tindakan pilihan partai politik para pengasuh di empat pondok pesantren dijombang.
4	Abdul Chalik (2010). Religion and Local Politics: Exploring the Subcultures and the Political Participation of East Java NU Elites	NU memiliki pola partisipasi politik yang dipengaruhi oleh subkultur lokal seperti Mataraman, Arek, Pesisiran, Madura, dan Pandalungan. Kiai memainkan peran ganda sebagai pemimpin agama dan politik.	Studi kualitatif dengan analisis budaya dan wawancara mendalam terhadap elite NU di Jawa Timur.	Penelitian ini lebih spesifik pada budaya pilihan partai politik kiai pesantren di Jombang daripada pengaruh subkultur secara umum.
5	Taufik Alamin (2022). <i>Budaya Politik Masyarakat Mataraman di Kota Kediri</i>	Masyarakat Mataraman memiliki orientasi politik yang dipengaruhi oleh budaya lokal, tetapi cenderung rasional dalam pemilu. Faktor budaya guyub rukun dan pragmatisme mendominasi.	Studi kualitatif dengan pendekatan budaya dan analisis perilaku pemilih di Kota Kediri.	Penelitian Ini lebih spesifik pada peran kiai dalam memengaruhi pilihan politik di Jombang, bukan fokus budaya lokal secara umum.
6	Muhtar Haboddin (2021). <i>Strategi Elite Tradisional Berkuasa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan</i>	Elite tradisional seperti karaeng mampu merebut, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan melalui pilkada langsung; kemenangan Nurdin Abdullah menjadi contoh konkret.	Studi deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis kasus pilkada di Bantaeng.	Penelitian ini lebih fokus pada peran kiai di Jombang dalam konteks budaya pesantren, bukan elite tradisional.
7	Susilastuti DNJ (2020). <i>Politik Ketegangan Wartawan: Studi Ketegangan Wartawan dan</i>	Wartawan mengambil peran sebagai challenger dalam ketegangan politik, baik sebagai bagian dari klaim	Analisis karya jurnalistik wartawan menggunakan teori	Penelitian ini fokus pada budaya pilihan politik kiai pesantren,

	<i>Pemerintah dalam Panggung Demokrasi (1996-2015)</i>	maupun pengamat, memunculkan dinamika kekuasaan, aktivisme, dan politik.	contentious politic dari Charles Tilly dan Sidney Tarrow.	bukan pada dinamika ketegangan wartawan dan pemerintah.
8	Zulkifli Hasan (2017). <i>The Role of Religious Leaders in Political Party Selection: A Case Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia</i>	Kiai menjadi mediator antara partai politik dan pesantren; ideologi partai memengaruhi keputusan politik kiai.	Wawancara mendalam dan observasi langsung di pesantren Jawa Timur.	Fokus pada hubungan elite politik dan kiai tanpa spesifik membahas lokalitas Jombang.
9	Ahmed Al-Muradi (2020). <i>The Interplay of Religion and Politics: Insights from Islamic Schools in Southeast Asia</i>	Pesantren sering digunakan untuk mobilisasi politik; legitimasi moral kiai penting bagi partai politik.	Studi komparatif pesantren di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.	Penelitian kami lebih lokal di Jombang.
10	Querubin, P. (2010). <i>Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines</i>	Keluarga memiliki peran besar dalam pemerintahan dan dinasti politik di Filipina; lebih dari 50% anggota kongres dan gubernur terpilih memiliki hubungan kekerabatan.	Metodologi fenomenologi hubungan kekeluargaan dan politik, fokus pada kelanggengan dinasti politik di Filipina.	Penelitian ini mengkaji budaya pilihan partai politik kiai pengasuh pesantren yang terjun ke dunia politik di Jombang.

Penelitian politik lokal di Kabupaten Jombang, lebih luas cakupannya karena mengeksplorasi fenomenologi politik berbasis geokultural yang bisa mempengaruhi perpolitikan nasional Indonesia dikarenakan keempat pesantren (PP Mamba'ul Ma'arif, PP Bahrul Ulum, PP Darul Ulum serta PP Tebuireng) adalah pondok yang berpengaruh di tingkat nasional para pengasunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi menitikberatkan pada tindakan pilihan politik kiai.

#### **F. Definisi Operasional.**

Definisi operasional pada penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep-konsep abstrak tersebut dapat diukur dan dianalisis secara empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi operasional dari tindakan kiai dalam pilihan partai politik.

1. Kiai merupakan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren yang memiliki otoritas religius dan moral di kalangan santri serta masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, kiai merupakan individu yang diakui oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang berpengaruh.
2. Tindakan kiai merupakan semua bentuk aktivitas, keputusan, serta pengaruh yang dilakukan oleh kiai terkait dengan pilihan partai politik. Tindakan ini bisa meliputi, deklarasi dukungan terhadap partai politik tertentu. Partisipasi dalam kampanye politik. Pengarahan bahkan nasihat kepada santri dan masyarakat mengenai pilihan politik. Penggunaan platform keagamaan guna menyampaikan pesan politik.
3. Pilihan partai politik merupakan keputusan kiai untuk memilih partai politik tertentu dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 atau politik lokal, ini bisa dilihat dari, pernyataan publik mengenai dukungan terhadap partai politik. Keterlibatan dalam kegiatan partai politik. Pengaruh yang diberikan kepada pengikutnya untuk memilih partai tertentu.

Studi tindakan kiai pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur berlokasi di pondok pesantren yang berada di Jombang, Jawa Timur. Sedangkan subjeknya kiai yang menjadi caleg atau pengasuh pondok pesantren di Jombang.

Tujuan studi menganalisis bagaimana tindakan dan pengaruh kiai dalam menentukan pilihan partai politik serta dampaknya terhadap santri dan masyarakat sekitar. Metode studi ini menggunakan Observasi, wawancara, serta analisis dokumentasi terkait aktivitas politik kiai. Dalam studi tindakan kiai terhadap pilihan partai politik dianalisis guna memahami peran serta pengaruh mereka dalam konteks sosial dan politik lokal, serta bagaimana hal ini bisa mencerminkan dinamika politik di Jombang, Jawa Timur.